

PILKADA DI MASA PANDEMI, BUAT APA DAN SIAPA?

Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Yayasan Perludem

Minggu, 17 Mei 2020



KPU Diminta Kreatif Siasati Situasi Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pilkada 2020. KPU diminta membuat penyesuaian tahapan jika harus menggelar pemilihan di tengah pandemi. Kisah sukses Korea Selatan gelar pemilu bisa dicontoh

Oleh **DIAN DEWI PURNAMASARI**

11 Mei 2020 08:30 WIB • 5 menit baca

A TEKS ▾





BINCANG

Zubairi Djoerban: Puncak pandemi bulan Mei itu omong kosong

Ia kekeh mendorong pengujian masal yang menurutnya bisa mengidentifikasi cepat dan membantu strategi pemerintah menerapkan pembatasan.

Heru Triyono 25/04/2020 10:18 WIB



Sebagian besar orang mengenalnya sebagai guru besar ilmu penyakit dalam Universitas Indonesia. Tetapi, ia juga merupakan penggemar fotografi, yang selalu menyempatkan waktu mengambil gambar saat bepergian. “Karena fotografi ini juga fungsi pendengaran saya hilang,” kata Zubairi bercerita.





Home > Nasional > Berita Peristiwa

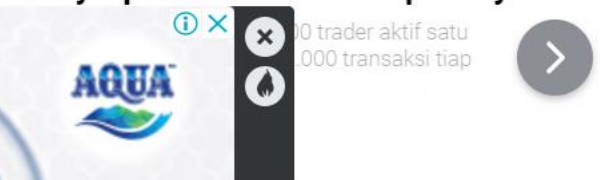
Menkes Terawan: Lucu Gelar Pilkada saat Pandemi Corona

CNN Indonesia | Sabtu, 16/05/2020 20:10 WIB

Bagikan :



Olymp Trade. Broker terpercaya



Home / News / Nasional

Pemerintah: Berdamai Bukan Menyerah, tapi Beradaptasi dengan Pola Hidup Baru

Kompas.com - 16/05/2020, 16:55 WIB

BAGIKAN:

Komentar (12)



Advertisement for GoodMax razors. It features four panels showing different razor models: a gold razor, a pink razor, a black razor, and another pink razor. A 'New' tag is present in the top right panel. A 'Close Ads X' button is at the bottom right of the ad area.

Tukarkan 10.000 Points Eraclub Anda dengan voucher senilai Rp 100.000 PERIODE HINGGA 22 MEI 2020 [BELI SEKARANG](#)

Platform perdagangan online... 10.000 di akun demo... Oly Tra Bro teper... Memu dunia fi sang mudah Olymp

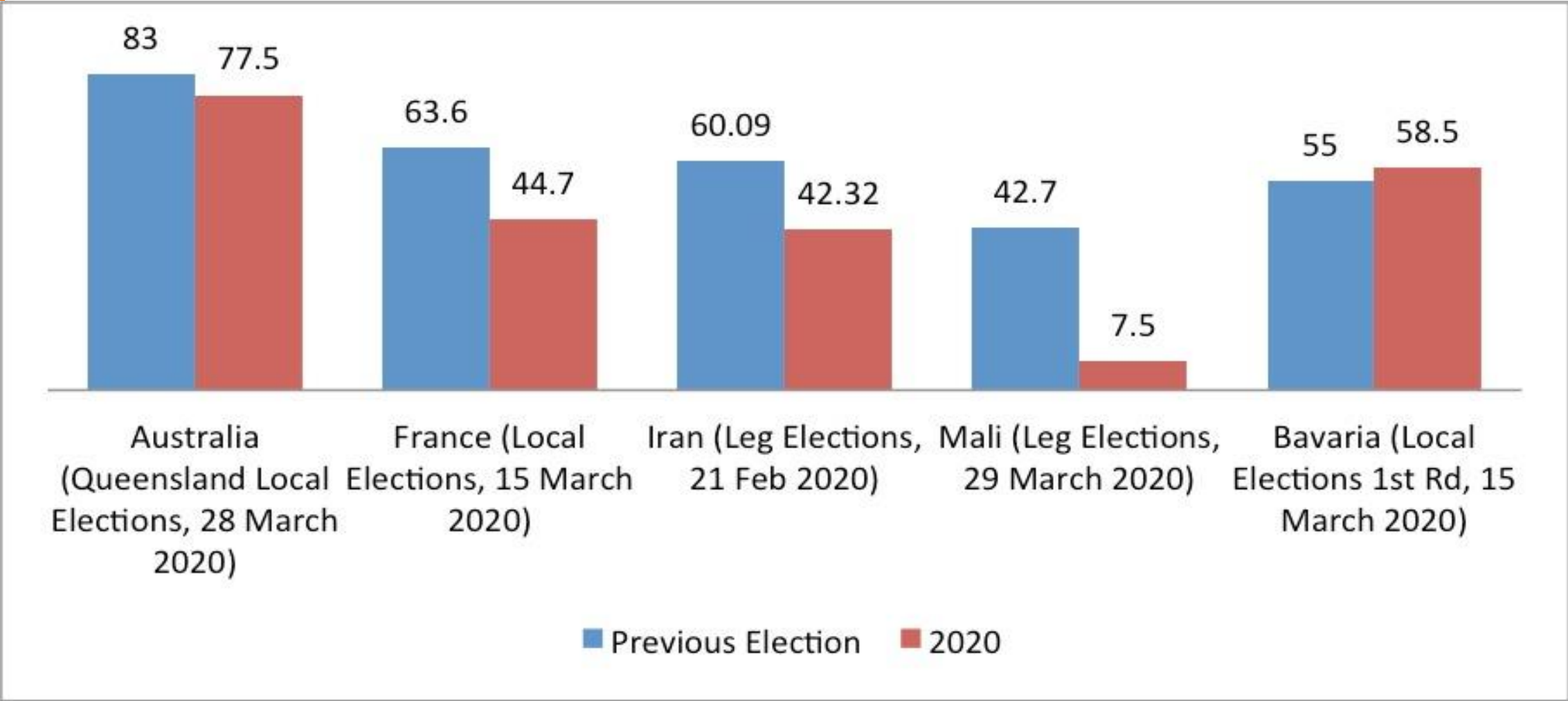
+ . **BISAKAH PEMILU**
o **“BERDAMAI”**
DENGAN COVID-19?

Pemilu dan Pandemi

- Covid-19 memaksa penundaan pemilihan nasional dan sub-nasional di hampir 60 negara dan wilayah.
- Beberapa KPU yang memutuskan untuk lanjut melaksanakan pemilihan di tengah krisis sebagian besar gagal untuk mengatasi kekhawatiran publik tentang kesehatan, yang menyebabkan rendahnya jumlah pemilih, masalah kredibilitas, berhentinya pekerja TPS, dan bahkan petugas pemilihan yang terpapar Covid-19.

IFES: Safeguarding Health and Elections, 2020.

Partisipasi Pemilih di Pemilu di Tengah Pandemi



Pembelajaran dari Pemilu Korea Selatan

- Kerangka hukum yang kompatibel dengan masa krisis dan sudah sejak lama ada (*early voting, home voting, overseas voting, shipboard voting, juga postal voting*).
- Ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu (dua kali lipat). "Memaksimalkan disinfeksi".
- Profesionalisme Penyelenggara.
- Daya dukung optimal teknologi: *ID Verification, Integrated Voter List System, Ballot Paper Printer, Counting Equipment*.
- Kunci kesuksesan: disiplin pemilih.
- Kepercayaan publik pada pemilu berbanding lurus dengan kepercayaan publik pada kapasitas pemerintah dalam menangani Covid-19.

https://www.youtube.com/watch?v=l_-Bnmk26Wc&feature=youtu.be

Kita bisa berdamai, kalau:

- damai » ber.da.mai
- v berbaik kembali; berhenti bermusuhan: kedua negara yang berperang itu telah ~
- v berunding untuk mencari kesepakatan (tentang harga): harga boleh ~
- Ada proses yang memadai untuk menuju ke arah itu: untuk bisa beradaptasi dan melakukan pembiasaan maka diperlukan waktu, sumberdaya, regulasi.
- Kepercayaan publik pada kapasitas negara.

Pemungutan Suara di bulan Desember 2020

- Meski pemungutan suara di bulan Desember, namun persiapan tahapan pra-pemungutan suara sudah dimulai beberapa bulan sebelumnya dan **beririsan dengan masa penanganan pandemi Covid-19**. Rancangan PKPU: tahapan berlanjut di bulan Juni 2020.
- Konsekwensi logis: **protokol penyelenggaraan pilkada sejalan dengan Protokol penanganan Covid-19**.
- Tidak ada pengaturan khusus atau cantelan eksplisit dalam Perpu yang memberikan kewenangan KPU untuk membuat pengaturan teknis pilkada (kerangka hukum teknis) yang sejalan dengan kondisi krisis/pandemi Covid-19. Perpu merujuk pada pengaturan biasa/normal. **Pilkada dengan normal baru, namun regulasinya berbasis normal lama**.
- Besarnya tuntutan dari pemangku kepentingan supaya KPU melakukan berbagai penyesuaian dan pembiasaan pengelolaan pilkada yang selaras dengan penanganan pandemi, padahal waktu yang tersedia untuk membuat pengaturan dan menyosialisasikannya sangat sempit. **Lalu bagaimana menyelaraskan normal baru dengan aturan main ala normal lama?**
- Tidak ada pengaturan tentang **kepastian alokasi anggaran tambahan sebagai konsekwensi biaya penyelenggaraan pilkada yang harus menyesuaikan dengan protokol penanganan Covid-19**. Khususnya alokasi dana untuk pengadaan perangkat kesehatan petugas dan perlengkapan penyelenggaraan pilkada (hand sanitizer, masker, sarung tangan, disinfektan, sabun cuci tangan, pengukur suhu, dll).

Kenapa Pilkada 2020

- Siklus lima tahunan, pengulangan pilkada 2015 (269 daerah) plus Kota Makassar (2018).
- Sebagian besar kepala daerah yang menjabat (207 daerah) akan berakhir masa jabatannya di pertengahan Februari 2021.
- Ada insentif petahana yang ingin didapat. Memelihara ingatan dan keterhubungan dengan kepemimpinan yang sedang berkuasa: impresi politik, sosial, dan psikologis.
- Kekhawatiran kalau pilkada di Sept 2020 maka Penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah akan merugikan partai-partai nonpenguasa.
- Ketersediaan anggaran. Narasi utama tapi bukan sesuatu yang tak bisa diatasi.
- Menjaga psikologis petugas pemilihan yang sudah direkrut.

Tantangan Utama Pemilu Berintegritas

Global Commission on Election, Democracy, and Security: Lima tantangan utama yang harus ditangani untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas:

- Membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap **hak asasi manusia dan keadilan pemilu**;
- Membangun badan penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak;
- Menciptakan institusi dan norma persaingan multi-partai serta pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para pesaing politik;
- Menghilangkan hambatan—hukum, administratif, politik, ekonomi dan sosial—terhadap partisipasi politik yang setara dan universal; dan
- Mengatur keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar.

Kesimpulan

- **Pilkada tidak boleh** melanggar HAM. Pilkada jangan sampai diselenggarakan dengan membahayakan kesehatan/keselamatan petugas, pemilih, dan peserta pemilihan.
- **Menurut WHO, Covid-19 tidak akan hilang 100% dari muka bumi.** Aktivitas kita harus menyesuaikan dengan normal baru saat ini. Maka, **harus ada waktu yang cukup dan daya dukung maksimal** untuk menyiapkan penyelenggaraan pilkada yang selaras/beradaptasi dengan normal baru tersebut.
- Harus dilakukan **MITIGASI RISIKO** secara komprehensif oleh penyelenggara pemilu menyangkut pelaksanaan tahapan pilkada dan risikonya penyebaran Covid-19. Sebagai basis menyusun protocol pelaksanaan pilkada yang kompatibel dengan protokol penanganan Covid-19.
- **2020 mestinya semua elemen fokus menangani Covid-19.** Seluruh komponen bangsa solid dan bekerja keras mengatasi penyebaran Covid-19. Sembari menyesuaikan adaptasi warga dengan normal baru.
- **Pilkada bulan Desember terlalu beresiko**, baik resiko kesehatan para pihak, maupun resiko menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan pilkada. Bila tak disikapi serius, bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan pada demokrasi.
- Saat kondisi obyektifnya adalah **pemungutan suara tidak mungkin terselenggara di Desember 2020**, maka **KPU harus berani segera membuat keputusan untuk menunda** secara tepat waktu, sigap, terukur, dan solid.